

Comparative Study of APBD Digital Transformation and Government Transparency in Bojonegoro Regency and Madiun

Argia Putri Salsabilla^{1*}, Chalista Aprillia Salsa Nabila², Indra Devian Lumban Gaol³

¹Universitas Negeri Surabaya, PSDKU Magetan, Ilmu Administrasi Negara

²Universitas Negeri Surabaya, PSDKU Magetan, Ilmu Administrasi Negara

³Universitas Negeri Surabaya, PSDKU Magetan, Ilmu Administrasi Negara

*E-mail: 25112064037@mhhs.unesa.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the comparison of digital transformation implementation in regional budget (APBD) management and its impact on the application of transparency principles in the local governments of Bojonegoro Regency and Madiun. The implementation of digitalization, such as e-budgeting and regional financial information systems, has become an important instrument in improving transparency and public accountability (Putra, 2023), while also expanding public access to budget information through open data (Sari, 2022). This study uses a qualitative approach with a comparative study method through document analysis and observation of regional government digital platforms. The results show that digital transformation significantly contributes to improving information accessibility and fiscal transparency (Rahman, 2024). However, its effectiveness is influenced by human resource capacity, technological readiness, and the commitment of local governments. This study indicates that digitalization alone cannot fully create transparency, but also depends on the quality of implementation and information management.

Keywords: Digital Transformation, Regional Budget, Budget Transparency, E-Budgeting.

Article Info:

Received 14 Mei 2026

Received in revised 11 September 2026

Accepted 21 Mei 2026

Available online 31 Agustus 2026

ISSN : 2745-6951

DOI :

<https://doi.org/10.35899/ijce.v7i3.1219>



Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan penerapan transformasi digital dalam pengelolaan APBD serta dampaknya terhadap proses penerapan prinsip transparansi di pemerintahan daerah Kabupaten Bojonegoro dan Kota Madiun. Penerapan digitalisasi seperti e-budgeting dan sistem informasi keuangan daerah menjadi suatu instrumen penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik (Putra, 2023), hingga membuka akses yang luas kepada masyarakat terhadap informasi anggaran melalui open data (Sari, 2022). Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan



[Indonesian Journal of Community Empowerment \(IJCE\)](#) is published under licensed of a CC BY-SA [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](#).

e-ISSN : 2745-6951

DOI : <https://doi.org/10.35899/ijce.v7i3.1219>

pendekatan kualitatif dengan studi komparatif melalui analisis dokumen dan observasi platform digital pemerintah daerah. Hasil penelitian menegaskan bahwa transformasi digital sangat berkontribusi terhadap proses peningkatan aksesibilitas informasi dan transparansi fiscal (Rahman, 2024). Namun, dalam efektivitasnya dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia, kematangan kesiapan teknologi, dan komitmen dari pemerintah daerah. Penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak sepenuhnya bisa melahirkan suatu prinsip transparansi, melainkan bergantung pada kualitas implementasi dan pengelolaan informasi yang baik.

Kata Kunci: Transformasi Digital, APBD, Transparansi Anggaran, E-Budgeting

I. PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam pemerintahan merupakan suatu bentuk upaya dari reformasi birokrasi yang berfokus untuk mengembangkan *good governance* dengan orientasi utama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, penerapan digitalisasi melalui *e-government*, khususnya e-budgeting menjadi instrumen penting dalam meningkatkan transparansi serta akuntabilitas APBD [1]. Proses digitalisasi memungkinkan proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga pelaporan anggaran dilakukan secara lebih terintegrasi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-budgeting mampu meningkatkan proses keterbukaan informasi kepada publik serta efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah [2]. Selain itu, pendayagunaan platform open data anggaran juga memberikan peluang secara luas bagi masyarakat untuk mengakses dan mengawasi penggunaan anggaran [3].

Adanya asumsi mengenai digitalisasi secara otomatis menghasilkan transparansi perlu dikritisi. Dalam praktiknya, tidak semua sistem digital itu mampu menghasilkan keterbukaan informasi yang substansial. Sebagian daerah mengalami kendala dalam hal keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, serta kurangnya komitmen untuk menunjukkan data yang lengkap oleh masyarakat. Di samping itu, terdapat perbedaan dalam mengadopsi dan mengimplementasikan digitalisasi dalam pengelolaan APBD [4]. Perbedaan ini memungkinkan adanya ketidaksetaraan kapasitas kelembagaan dan kebijakan daerah. Oleh karena itu, pendekatan komparatif diperlukan untuk mengidentifikasi perbedaan-perbedaan tersebut sekaligus memahami faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini berfokus pada daerah Kabupaten Bojonegoro dan Kota Madiun yang digunakan sebagai objek kajian untuk menganalisis bagaimana transformasi digital APBD diimplementasikan serta sudah sejauh mana dampaknya terhadap transparansi di pemerintahan daerah. Melalui metode komparatif, dengan penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman mengenai efektivitas digitalisasi dalam meningkatkan transparansi.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode komparatif antar daerah untuk menganalisis implementasi transformasi digital dalam suatu pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berada di Kabupaten Bojonegoro dan Kota



Madiun. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif, dengan fokus utama penerapan sistem digitalisasi. Pendekatan ini dipilih untuk memahami perbedaan implementasi digitalisasi APBD serta dampaknya dalam transparansi anggaran pada kedua daerah tersebut [5].

Sumber data penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari studi laporan keuangan daerah (LKPD), portal transparansi anggaran, website resmi pemerintah daerah, serta beberapa jurnal yang relevan. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi nonpartisipatif terhadap platform digital pemerintah daerah. Selanjutnya, data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan Teknik analisis deskriptif komparatif melalui beberapa tahapan yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

3.1 Implementasi Transformasi Digital APBD di Kabupaten Bojonegoro dan Kota Madiun

Implementasi transformasi digital dalam pengelolaan APBD di Kabupaten Bojonegoro dan Kota Madiun menunjukkan adanya kesamaan dalam adopsi sistem berbasis elektronik seperti e-budgeting dan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Kedua daerah telah mengintegrasikan teknologi digital dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan anggaran sebagai bagian dari reformasi birokrasi.

Namun demikian, tingkat implementasi di kedua daerah menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Kabupaten Bojonegoro memperlihatkan tingkat inovasi yang lebih tinggi melalui pengembangan platform open data yang memungkinkan akses publik terhadap informasi anggaran secara lebih luas dan rinci. Sementara itu, Kota Madiun cenderung masih berfokus pada digitalisasi proses administratif internal, sehingga keterbukaan informasi kepada publik belum sepenuhnya optimal.

3.2 Dampak Transformasi Digital terhadap Transparansi Pemerintahan Daerah

Transformasi digital terbukti memberikan kontribusi terhadap peningkatan transparansi, khususnya dalam aspek aksesibilitas informasi anggaran. Di Kabupaten Bojonegoro, ketersediaan portal open data memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi APBD secara lebih terbuka, yang pada gilirannya mendorong partisipasi publik dalam pengawasan anggaran. Sebaliknya, di Kota Madiun, meskipun sistem digital telah diterapkan, transparansi yang dihasilkan masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya informatif bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan sistem digital tidak secara otomatis menghasilkan transparansi yang substantif.

3.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Transformasi Digital

Analisis komparatif menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor kunci yang memengaruhi efektivitas transformasi digital dalam meningkatkan transparansi, yaitu:

- 1) Kapasitas sumber daya manusia (SDM). Daerah dengan SDM yang memiliki kompetensi digital yang memadai cenderung mampu mengelola dan mengembangkan sistem informasi secara optimal. Sebaliknya, keterbatasan SDM dapat menghambat pemanfaatan teknologi secara maksimal.
- 2) Kesiapan infrastruktur teknologi. Infrastruktur yang tidak memadai akan berdampak pada keterbatasan akses dan integrasi sistem, sehingga mengurangi efektivitas digitalisasi dalam mendukung transparansi.



- 3) Komitmen pemerintah daerah (political will). Transparansi sangat dipengaruhi oleh sejauh mana pemerintah daerah memiliki komitmen untuk membuka informasi kepada publik. Tanpa adanya komitmen tersebut, sistem digital cenderung hanya digunakan sebagai alat administratif.
- 4) Kualitas pengelolaan informasi. Informasi yang disajikan harus bersifat komprehensif, akurat, dan mudah dipahami oleh masyarakat agar transparansi dapat terwujud secara substantif.

3.4 Analisis Komparatif antara Kabupaten Bojonegoro dan Kota Madiun

Berdasarkan hasil analisis, Kabupaten Bojonegoro menunjukkan tingkat transparansi yang relatif lebih tinggi dibandingkan Kota Madiun. Hal ini ditandai dengan ketersediaan data anggaran yang lebih lengkap, akses publik yang lebih terbuka, serta adanya inovasi dalam penyediaan platform open data. Sebaliknya, Kota Madiun masih berada pada tahap penguatan sistem digital yang lebih berorientasi pada efisiensi internal dibandingkan transparansi eksternal. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi digital di setiap daerah tidak menghasilkan dampak yang seragam, melainkan sangat dipengaruhi oleh strategi implementasi dan kapasitas kelembagaan masing-masing daerah.

Pembahasan

Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak semata-mata ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur atau keberadaan sistem teknis, melainkan sangat bergantung pada orientasi kebijakan pemerintah daerah dalam memanfaatkan teknologi sebagai instrumen transparansi. Integrasi antara keberadaan sistem dan komitmen institusional menjadi fondasi utama dalam menciptakan tata kelola keuangan yang efektif. Hal tersebut sejalan dengan pandangan [6] yang menyatakan bahwa keberhasilan *e-budgeting* ditentukan oleh integrasi sistem dan komitmen institusional secara mendasar. Argumen ini diperkuat oleh temuan [7], yang menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi secara optimal untuk meningkatkan akuntabilitas fiskal di tingkat daerah.

Komitmen institusional, efektivitas transformasi digital dalam ruang publik sangat ditentukan oleh kualitas pengelolaan serta penyampaian data kepada masyarakat. Asumsi ini sejalan dengan pemikiran [8] yang menyatakan bahwa keterbukaan informasi publik bergantung pada kualitas penyajian data, bukan sekadar pada digitalisasi sistem. Lebih lanjut, temuan dalam [9] menegaskan bahwa efektivitas *e-budgeting* dalam meningkatkan transparansi sangat dipengaruhi oleh sejauh mana informasi tersebut dapat diakses, dipahami, dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Tanpa kemudahan aksesibilitas dan klaritas data, keberadaan platform digital tidak akan mampu mendorong partisipasi publik maupun pengawasan sosial yang substantive [10].

Dengan demikian, keberhasilan implementasi *e-government* dipengaruhi oleh faktor teknologi, organisasi, dan sumber daya manusia secara simultan. Kerangka ini mempertegas bahwa transformasi digital bukan merupakan tujuan akhir dari reformasi birokrasi, melainkan sebuah instrumen yang efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas implementasi dan tata kelola informasi [11]. Oleh karena itu, tanpa didukung oleh komitmen transparansi dan pengelolaan yang baik, digitalisasi berpotensi hanya menjadi formalitas administratif semata. Kebijakan publik di daerah idealnya mampu menyelaraskan ketiga faktor tersebut agar modernisasi tata kelola dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan akuntabilitas pemerintahan.



IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Bojonegoro memiliki tingkat implementasi transformasi digital yang jauh lebih maju dibandingkan dengan Kota Madiun. Bojonegoro memanfaatkan platform open data yang memiliki kegunaan memperluas akses untuk masyarakat terhadap informasi APBD. Kondisi ini membuat transparansi anggaran di Kabupaten Bojonegoro lebih transparan sekaligus mendorong partisipasi publik didalam pengawasan pemerintahan. Di sisi lain, Kota Madiun lebih berorientasi pada efiseinsi administrasi internal melalui sistem digitalisasi. Walaupun dalam pelaksanaannya sistem digital telah diterapkan, namun keterbukaan informasi secara transparansi kepada masyarakat masih belum sepenuhnya maksimal. Perbedaan tersebut menjelaskan bahwa keberhasilan suatu proses transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh keberadaan teknologi tetapi oleh kualitas pengelolaan informasi, kapasitas SDM, serta kesiapan infrastruktur yang baik, dan adanya komitmen pemerintah daerah sendiri.

V. REFERENSI

- [1] A. Putra, "Implementasi e-budgeting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas APBD di pemerintah daerah," *J. Adm. Publik*, vol. 12, no. 2, pp. 115–128, 2023.
- [2] S. Rahman and B. Nguyen-Viet, "Towards sustainable development: Coupling green marketing strategies and consumer perceptions in addressing greenwashing," *Bus. Strateg. Environ.*, 2022, doi: 10.1002/bse.3256.
- [3] Z. Chairri, A. Aflah, and I. Aprilyana, "Peningkatan Produktifitas UMKM Melalui Pemanfaatan Digital Marketing Di Kelurahan Tegal Sari I Kecamatan Medan Area," *E-Dimas J. Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 13, no. 2, pp. 344–349, 2022, doi: 10.26877/e-dimas.v13i2.6730.
- [4] N. A. Hamdani, R. Setiawan, and M. Soni, "Proceedings Book of International Conference on Association of Indonesian Entrepreneurship Study Programs 3 rd International Seminar on Entrepreneurship Sustainability The Role of Entrepreneurial Intention as a Mediating Variable in Enhancing Opportunity ," 2025.
- [5] J. W. Creswell, *Research Design: Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar, 2010.
- [6] L. K. Putra and S. Sulastri, "Meningkatkan loyalitas merek di kalangan generasi Z melalui pemasaran digital, AI, dan keberlanjutan," *Neraca J. Ekon. Manaj. Dan Akunt.*, vol. 3, no. 3, pp. 508–523, 2024, doi: 10.572349/neraca.v3i3.4405.
- [7] Z. T. Rahman, R. Lal, and R. Rena, "Challenges of communication with Gen-Z in the era of artificial intelligence-interceded digital economy," *AI-oriented competency ...*, 2024, [Online]. Available: <https://api.taylorfrancis.com/content/chapters/edit/download?identifierName=doi&identifierValue=10.1201/9781003440901-5&type=chapterpdf>.
- [8] P. A. Sari and W. P. Sari, "The small firm performance and entrepreneurial competence revealed through competitiveness framework: A case study of MSMEs in Indonesia," *Model. Econ. growth Contemp. ...*, 2022, doi: 10.1108/978-1-80262-431-120221001.
- [9] A. Sudirman, F. Halim, A. Bheradetha Nainggolan, and N. Butarbutar, "Meninjau Hubungan Antara Penggunaan Media Sosial dan Orientasi Pasar Terhadap Kinerja Bisnis Sektor UMKM," *Pros. Semin. Nas. Ekon. Dan Bisnis 2021 Univ.*



- Muhammadiyah Jember*, pp. 165–179, 2021.
- [10] Ekobistek, “Pengaruh teknologi, organisasi, dan sumber daya manusia terhadap keberhasilan implementasi sistem digital pemerintahan,” *Ekobistek J. Ekon. Bisnis dan Teknol.*, vol. 10, no. 4, pp. 150–162, 2022.
- [11] J. Agregasi, “Faktor-faktor keberhasilan implementasi e-government dalam tata kelola pemerintahan daerah,” *J. Agreg.*, vol. 11, no. 2, pp. 89–102, 2023.

